



Laporan Tahunan

Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

2025



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
1. Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik di BBPP Ketindan	1-3
2. Program dan Kegiatan	4-5
3. Maklumat Layanan PPID	6
4. SDM dan Anggaran	7 - 8
5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan PPID	10-12
6. Rekapitulasi Permohonan Tahun 2025	13
7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	14
8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan	14
9. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan	15
10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Pendidikan	15-17
11. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	17
12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	18-19
13. Kendala dan Tantangan	20
14. Penutup	21

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Melalui Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini, diharapkan bisa memberikan informasi tentang penyelenggaraannya di BBPP Ketindan Tahun Anggaran 2025. Besar harapan kami bisa memberikan informasi dan manfaat bagi semua masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Penanggungjawab PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan,
Kepala Balai



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si

1. SEKILAS KETERBUKAAN Informasi dan Dokumentasi Publik di BBPP Ketindan



Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka BBPP Ketindan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.



1. SEKILAS KETERBUKAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI BBPP KETINDAN

“Sebagai badan publik, BBPP Ketindan mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.



Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

1. SEKILAS KETERBUKAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI BBPP KETINDAN

Dasar Hukum Kebijakan Pimpinan Penunjukkan Tim PPID

01

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

02

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

03

Keputusan Menteri Pertanian (Kepmen) terbaru, salah satunya adalah Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025, mengenai Penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

04

Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

05

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

JANUARI

- Penetapan anggaran dan program kerja kegiatan PPID, dan Penetapan Tim Kerja Website/PPID BBPP Ketindan
- Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja PPID Tahun Anggaran 2024
- Pembuatan laporan bulanan Desember 2024, laporan tahunan 2024, dan laporan monev PPID tahun 2024
- Updating pemberitaan dan berbagai informasi di website dan media sosial
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi

01.

FEBRUARI

- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Updating pemberitaan dan berbagai informasi di website dan media sosial BBPP Ketindan
- Penandatanganan Komitmen PPID
- Pembuatan Daftar Informasi Publik
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
- Penyiapan dokumen untuk diumumkan dan disediakan di website dan portal PPID

02.

MARET

- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Updating pemberitaan dan berbagai informasi di website dan media sosial BBPP Ketindan
- Updating dokumen di portal PPID dan website
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi

03.

APRIL

- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Updating pemberitaan dan berbagai informasi di website dan media sosial BBPP Ketindan
- Rapat triwulan Tim Website/PPID
- Updating dokumen di portal PPID dan website
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi

04.

MEI

- Updating publikasi, konten di media sosial dan website
- Membuat laporan bulanan PPID
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi

05.

JUNI

- Updating publikasi dan konten di media sosial
- Membuat laporan bulanan PPID
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
- Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tentang pembuatan video pendek melalui zoom meeting
- Mengikuti rapat koordinasi pembuatan video Brigade Pangan yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

06.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

JULI

- Updating publikasi dan konten di media sosial
- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
- Mengupload dokumen PPID ke website dan portal PPID
- Rapat internal persiapan kegiatan kerjasama dengan Palestina

07.

AGUSTUS

- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Updating publikasi dan konten di media sosial
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
- Mengupload dokumen PPID ke website dan portal PPID
- Rapat triwulan PPID BBPP Ketindan
- Mengikuti rapat koordinasi tentang persiapan pemeringkatan PPID dan sosialisasi pengisian SAQ

08.

SEPTEMBER

- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Updating publikasi dan konten di media sosial
- Pengisian SAQ lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP)
- Perbaikan server internal di BBPP Ketindan
- Pengumpulan Monev SAQ dan Website ke PPID Utama
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi

09.

OKTOBER

- Pembuatan laporan bulanan PPID
- Updating publikasi dan konten di media sosial
- Rapat triwulan Tim Website/PPID
- Updating dokumen di portal PPID dan website
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
- Pembuatan video pengelolaan PPID
- Pengawalan server dan website BBPP Ketindan

10.

NOVEMBER

- Updating publikasi, konten di media sosial dan website
- Membuat laporan bulanan PPID
- Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
- Membuat bahan tayang untuk wawancara pemeringkatan keterbukaan informasi publik
- Menghadiri wawancara pemeringkatan keterbukaan informasi publik

11.

DESEMBER

- Updating publikasi, konten di media sosial dan website
 - Membuat laporan bulanan PPID
 - Memproses permohonan informasi dan dokumentasi
 - Mengikuti Rapat Koordinasi dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
 - Mengikuti rapat persiapan diundang sebagai pembicara pada acara yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12.

3. MAKLUMAT LAYANAN PPID

“Dengan ini, kami menyampaikan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku”



Penandatanganan Komitmen dan Maklumat PPID

4. SDM DAN **ANGGARAN**

Struktur Organisasi



ANGGARAN PPID

TAHUN 2025 ANGGARAN PPID 100.160.000



Diseminasi Publikasi

Diseminasi publikasi di media daring, cetak, dan elektronik (berupa pemberitaan, dan berbagai konten informatif di media sosial)



Diseminasi Promosi

Penyebarluasan informasi berupa leaflet, brosur, buku, dan banner



Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan

Rapat Koordinasi, Pertemuan, Bimtek, Perjalanan Dinas



Peningkatan Sarana Prasarana

Penambahan sarana prasana pendukung pelayanan informasi dan dokumentasi

Penetapan anggaran dan alokasi yang tepat akan mempercepat pelayanan keterbukaan informasi publik dan pelayanan secara keseluruhan

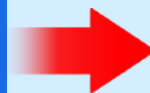
5. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PPID

BBPP Ketindan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana penunjang yang representatif. Seperti kelengkapan elektronik yaitu seperangkat PC, laptop, scanner, printer, audio visual dan LED yang menayangkan secara intens tata cara permohonan dan berbagai kegiatan di BBPP Ketindan berupa video, ruang layanan dilengkapi dengan meja dan kursi tamu, tempat konsultasi informasi publik gratis, berbagai media cetak seperti brosur, leaflet, dan majalah, media sosial, lemari tempat penyimpanan dokumen, serta berbagai piagam dan plakat penghargaan yang diterima oleh BBPP Ketindan.

Selain itu juga dilengkapi transparansi standar biaya layanan dan kelengkapan untuk penyandang disabilitas seperti permohonan informasi bagi pemohon tuna netra berupa panduan huruf braille, seperangkat kursi roda dan alat bantu kaki serta website yang bisa digunakan oleh pemohon tuna netra dan tuna rungu. Juga tersedia Whatsapp Center serta website dengan berbagai layanan inovasi dan layanan interaktif.

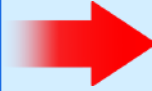


Ruang Layanan

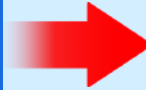


Permohonan Informasi

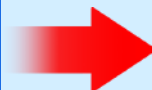
5. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PPID



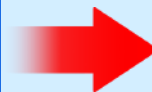
Konsultasi Informasi Publik



Sarpras Elektronik



Unit Kesehatan dan Ruang Laktasi



Sarpras Bagi Penyandang Disabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<https://ppid.pertanian.go.id> - BBPP Ketindan

5. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PPID

Penyimpanan Dokumen Manual dan Digital

Dokumen disimpan dan diarsipkan secara manual di rak/ lemari arsip, map, dan laci. Sedangkan arsip digital disimpan di server, laptop/ PC, dan hardisk eksternal.

Ruang Server

Untuk melengkapi sarpras PPID dan fasilitas umum bagi tamu dan pengguna dengan wifi, serta pengelolaan website dan internet dengan server yang dikelola sendiri

Ruang Layanan

Dilengkapi dengan help desk, klinik konsultasi informasi, sarana penyandang disabilitas, ATK, seperangkat IT, lemari penyimpanan dokumen, LED dan berbagai penghargaan

SARANA PRASARANA PENDUKUNG

Website dan Portal

Berisi konten pemberitaan dan artikel, informasi dan dokumentasi, agenda, foto dan video kegiatan, berbagai layanan dan inovasi, tautan UK/UPT, infografis, serta berbagai tautan media sosial di BBPP Ketindan

Ruang Arsip

Ruang arsip merupakan tempat untuk menyimpan arsip aktif dan in aktif, dimana semua telah sesuai dengan retensi kearsipan, juga untuk menunjang kebutuhan keterbukaan informasi publik

Sarana dan Prasarana Lainnya

Ruang laktasi dan UKK, jalur evakuasi, titik kumpul, ruang perpustakaan, ruang makan, asrama dan guest house, masjid, wifi, laboratorium, lahan praktik, greenhouse, LKPIA, aula, kelas indoor, kantin/ toko

6. REKAPITULASI PERMOHONAN TAHUN 2025

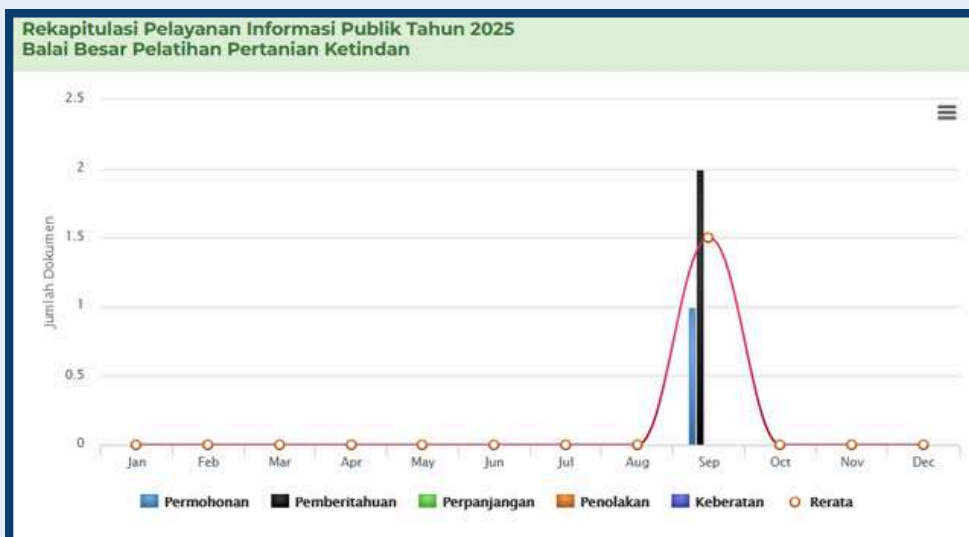
PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan menerima permohonan informasi melalui email, whatsapp, portal PPID, media sosial, kunjungan langsung dengan datang ke ruang layanan informasi publik di BBPP Ketindan. Seperti Grafik dibawah:



Gb : Jumlah pemohon melalui berbagai media

Berdasarkan dari jumlah pemohon informasi dalam waktu satu tahun, jumlah pemohon pada tahun 2025 ialah 108 orang. Dengan rincian:

- Email 18 orang.
- Whatsapp 48 orang.
- Portal PPID 1 orang.
- Kunjungan langsung 4 orang.
- Media sosial 37 orang.



Gb : Jumlah pemohon melalui portal PPID BBPP Ketindan

7. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, dengan rincian pelayanan tercepat 21 menit 29 detik, dengan rata-rata pelayanan 21 menit 29 detik. Berikut gambar rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.

1	2	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan
Pelayanan Informasi Publik				
Rata rata pelayanan 21 menit, 29 detik	Pelayanan Tercepat 21 menit, 29 detik	Pelayanan Terlama 21 menit, 29 detik		
Pelayanan Keberatan				
Rata rata pelayanan 00 detik	Pelayanan Tercepat 00 detik	Pelayanan Terlama 00 detik		

Gb : Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi

8. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

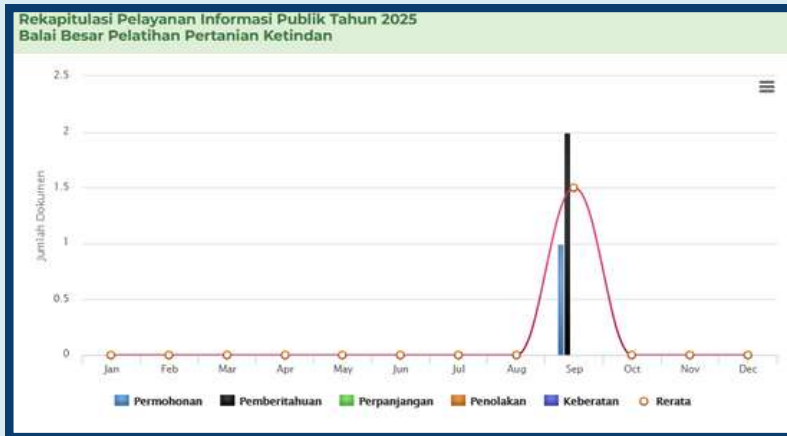
Berikut adalah rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan pada 1 (satu) tahun pada tahun 2025 nihil (atau nol pemohon). Seperti tampak pada gambar yang disajikan.

Pelayanan Keberatan		
Rata rata pelayanan 00 detik	Pelayanan Tercepat 00 detik	Pelayanan Terlama 00 detik

Gb : Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan

9. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN

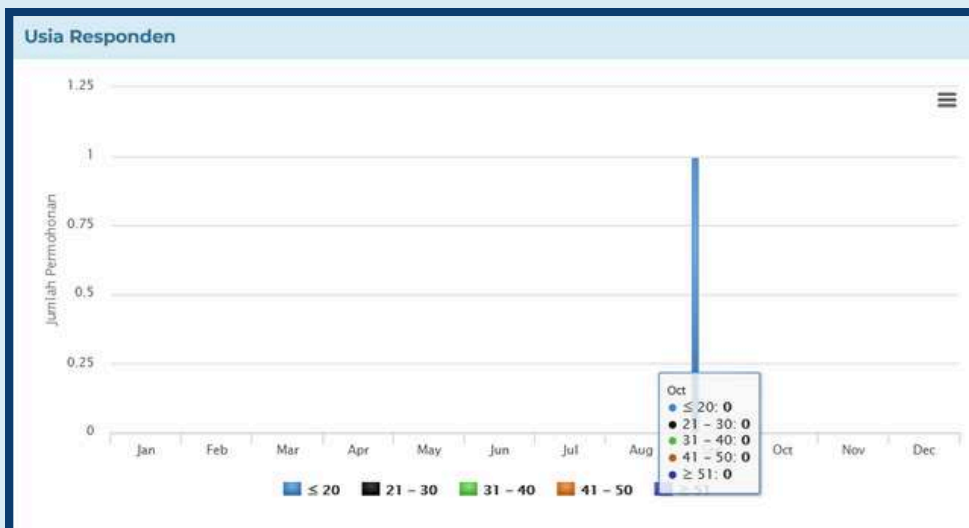
Pada tahun 2025 tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Seperti tampak pada gambar.



10. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN

a. Jumlah pemohon berdasarkan usia

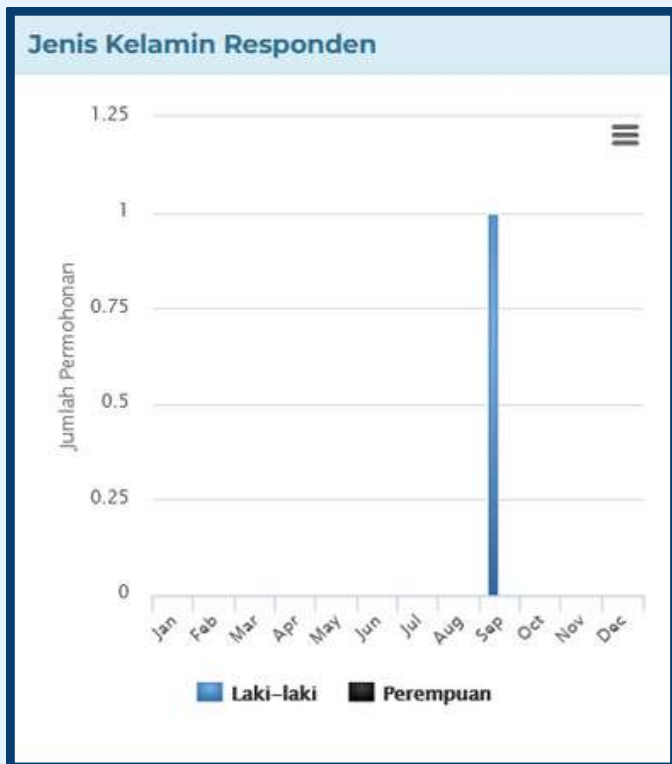
Berdasarkan usia, yang dikelompokkan pada rentang waktu sepuluh tahunan, dapat dilihat dalam gambar, yakni usia pemohon 100% kurang dari 20 tahun 0, sedangkan rentang usia lainnya tidak terdapat pemohon.



Gb : Jumlah pemohon berdasarkan usia

10. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN

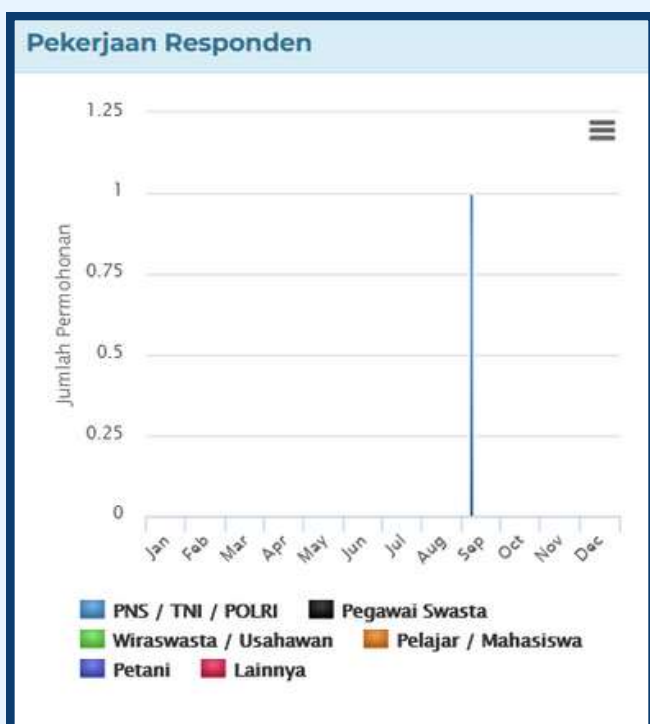
b. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan jenis kelamin, total 1 pemohon berjenis kelamin perempuan. Seperti tampak dalam gambar statistik disamping.

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin

c. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

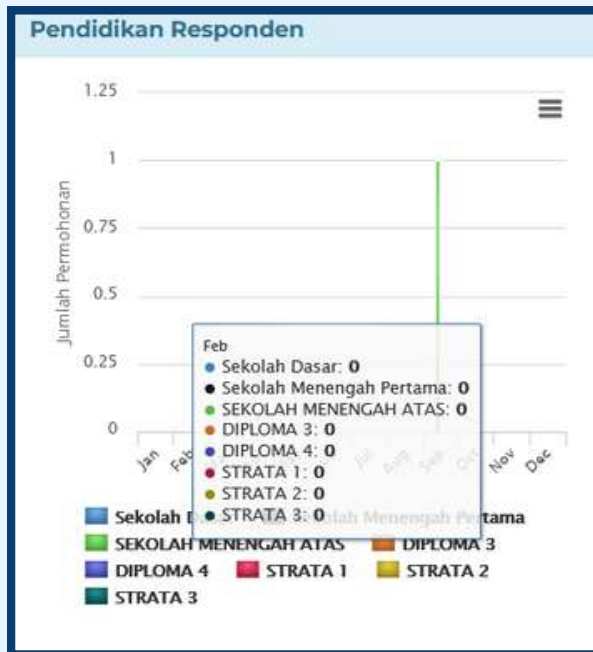


Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 1 orang pemohon total adalah dari unsur pelajar/mahasiswa.

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

10. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN

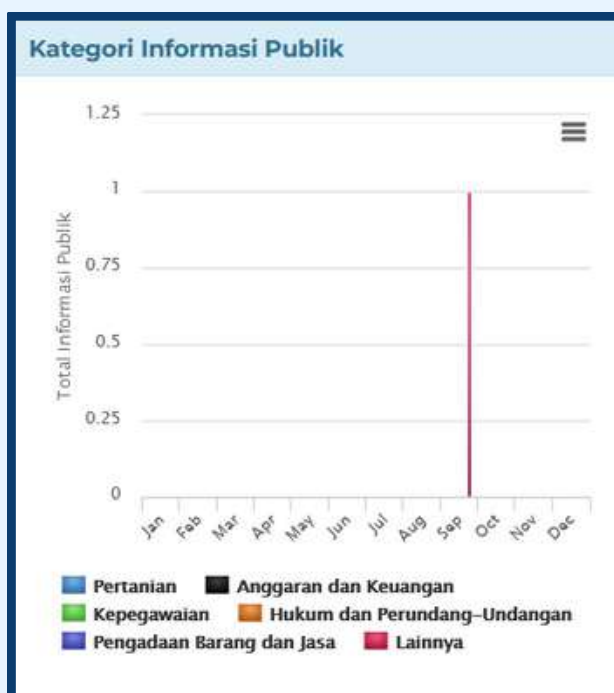
d. Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan



Berdasarkan pendidikan, sebanyak 1 orang pemohon berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Seperti tampak dalam gambar statistik di samping.

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan

11. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN



Berdasarkan pengelompokan, sebanyak 1 orang pemohon informasi tentang informasi lain-lain. Total 1 orang pemohon seperti tampak dalam gambar statistik di samping.

Gb : Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan

12. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Dalam perkembangan inovasi layanan, BBPP Ketindan terus berupaya menyempurnakan. Tahun 2025 inovasi pestisida nabati “MICESSLA” meraih penghargaan dalam Unit Pelayanan Publik Inovator pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Walaupun belum berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dalam KIPP, tetapi inovasi Micessla telah membantu banyak petani dan direplikasi baik dari institusi maupun perorangan seperti petani/ pelaku pertanian lainnya.

Inovasi MICESSLA bermanfaat untuk menyediakan alternatif pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang efektif, aman, dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan kekayaan hayati lokal Indonesia.

Dampaknya ialah menurunkan ketergantungan petani terhadap pestisida kimia sintetis, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas petani dalam memproduksi dan menggunakan pestisida nabati secara mandiri.



PESTISIDA NABATI MICESSLA

Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati memiliki peran yang besar sebagai alternatif penggunaan pestisida sintetis dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Bahan aktif pestisida nabati berasal dari kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat - zat kimia sekunder lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke tanaman yang terserang OPT, tidak berpengaruh terhadap fotosintesis pertumbuhan ataupun aspek fisiologis tanaman lainnya, namun berpengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormon, reproduksi, perilaku (atraktan) antifeedant, dan sistem pernafasan OPT.

Dalam mendukung usaha tersebut, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menghasilkan **Formulasi Pestisida Nabati MICESSLA** yang merupakan hasil kajian dari Departemen Proteksi Tanaman yang bermanfaat baik sebagai insektisida, fungisida, maupun bakterisida.

12. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Selain inovasi Micessla, BBPP Ketindan juga mempunyai layanan tanpa login untuk pengguna layanan berbasis website. Inovasi ini ialah "HALOWid". Layanan ini memfasilitasi konsultasi pertanian dan pengembangan usaha bagi pelaku usahatani binaan (tenant) dan masyarakat pertanian secara umum, yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Layanan inovasi HALOWid menjawab kebutuhan masyarakat khususnya yang ingin bertanya dan mendapatkan pencerahan berupa solusi atau jawaban atas permasalahan dunia pertanian dan agribisnis. Tujuan dikembangkannya Inovasi HALOWid? adalah menyediakan media konsultasi dan pendampingan/pembimbingan teknis pertanian dan pengembangan agribisnis bagi tenant dan masyarakat pertanian secara umum, yang dapat diakses dengan mudah, kapan saja, dan dari mana saja. Kedepan, layanan ini akan diintegrasikan ke dalam layanan yang lebih user friendly dan memudahkan pengguna untuk menggunakan layanan.

HALOWid?

Layanan ini menjawab kebutuhan masyarakat khususnya yang ingin bertanya dan mendapatkan pencerahan berupa solusi atau jawaban atas permasalahan dunia pertanian dan agribisnis.



"HALOWid?" dikelola oleh para Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan yang kompeten.

Adapun kompetensi bidang keahlian Widyaiswara berdasarkan spesialisasinya yaitu tentang:

13. KENDALA DAN TANTANGAN

01

Kendala Internal

Keterbatasan anggaran dan infrastruktur

02

Kendala Teknis

1. Akses internet bagi pengguna
2. Integrasi sistem informasi yang belum optimal.
3. Masih tergantung pada sistem manual

03

Kendala Sosial Budaya

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak akses informasi.
2. Budaya kerahasiaan dan resistensi terhadap keterbukaan.

04

Tantangan

1. Mengembangkan strategi komunikasi efektif.
2. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak akses informasi.

14. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi di BBPP Ketindan.

Tak lupa, kami berterima kasih atas dukungan dan kerjasama dari semua pegawai di BBPP Ketindan, sehingga pada tahun 2025, BBPP Ketindan meraih penghargaan Peringkat III Unit Kerja Eselon II pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan predikat "INFORMATIF". Semoga di tahun berikutnya kami bisa mempertahankan dan memperbaiki prestasi lebih baik lagi.

Kami juga menyadari bahwa laporan keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini masih sangat jauh dari sempurna. Evaluasi sangat diperlukan dalam perbaikan keterbukaan informasi publik beserta pengelolaannya yang lebih maju, cepat, tepat, dan akurat serta memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



Jl. Ketindan No. 1 Lawang , Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Malang 65214
Tlp 0341 - 426235/427925 (WA : 0897 9798 700)